

Neoliberalisme Strategi Kebijakan IMF

Oleh:
Syamsul Ma'arif
Dosen Tetap Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Unila

ABSTRACT

Liberalization and privatization are driven by neoliberalism which demands for termination of state interference in economics. Neoliberalism it self perceives state interference in economic areas bad, damaging, and inefficient to economic life. Liberalization and privatization emerged from developing countries experience in managing economics. Through multilateral agency of IMF, liberalization and privatization spread widely throughout the world and directly influence the economic policy making of the less developed countries So, IMF is used as instrument of north countries to force their development model to the south countries.

Key Word: *neoliberalism, economic, liberalization and privatization*

PENDAHULUAN

Liberalisasi dan privatisasi ekonomi sering diasosiasikan sebagai bagian dari fenomena global neoliberalisme yang menghendaki penghentian campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi. Sementara neoliberalisme itu sendiri merupakan suatu paham yang menilai kehadiran pemerintah di bidang ekonomi sebagai sesuatu yang buruk, merusak, dan tidak efisien bagi kehidupan ekonomi. Menurut penganut paham ini, pemerintah yang beroperasi dengan logika kekuasaan tidak memberi tempat bagi berkembangnya struktur pasar yang sehat dan kompetitif.

Kebijakan pemerintah untuk melakukan liberalisasi dan privatisasi diambil untuk merespon tuntutan dari lingkungan internal dan eksternal. Dari sisi internal, kebijakan tersebut didorong oleh tuntutan efisiensi atas sektor-sektor usaha milik negara akibat kesulitan fiskal setelah ditimpa krisis ekonomi. Sedangkan dari sisi eksternal, kebijakan tersebut tak

lepas dari dominasi sistem ekonomi kapitalisme yang mengarahkan dunia menuju pasar bebas dengan pemberian peran lebih besar kepada sektor swasta. Dalam konteks ini lembaga multilateral seperti IMF berperan penting mendesakkan liberalisasi dan privatisasi terutama ke negara-negara berkembang.

MASALAH PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan sejumlah penelitian: *pertama*, bagaimana peran *International Monetary Fund* (IMF) dalam penyebaran paham neoliberalisme; *kedua*, bagaimana langkah *International Monetary Fund* (IMF) dalam menyebarkan paham neoliberalisme?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan jenis penelitian historis. Metode ini berusaha mengumpulkan data yang merupakan gejala masa lampau untuk kemudian

menafsirkan dalam rangka memahami kenyataan masa sekarang, bahkan sering digunakan untuk memahami keadaan di masa yang akan datang. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumentasi yakni pengumpulan data dari berbagai macam literatur dan referensi. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif melalui langkah-langkah reduksi data, penyajian data, yang diakhiri dengan verifikasi dan penarikan kesimpulan (Milles and Huberman, 1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Neoliberalisme

Liberalisasi dan privatisasi merupakan wacana ekonomi-politik yang populer ketika perekonomian Amerika Serikat pada tahun 1970-an dihantam berbagai masalah seperti: membubungnya angka inflasi, merosotnya pertumbuhan ekonomi, membengkaknya pengangguran, defisit sektor publik, dan terjadinya krisis minyak. Perkembangan tersebut membuat posisi hegemonik Amerika Serikat dalam banyak bidang hubungan internasional menjadi merosot. Untuk mengembalikan posisi hegemoniknya, Presiden Richard Nixon melakukan berbagai tindakan. Strategi yang ditempuh adalah liberalisasi pasar dengan menyingkirkan segenap rintangan bagi investasi dan pasar bebas seperti: proteksi, paham keadilan sosial, kesejahteraan bagi rakyat, dan berbagai tradisi pengelolaan sumber daya alam berbasis rakyat. Sejak saat itu dimunculkanlah ide globalisasi yang pada dasarnya berpijak pada paham liberalisme klasik (Fakih, 2001:217-218).

Hal ini menandai kebangkitan kembali paham liberalisme klasik yang populer dengan sebutan neoliberalisme (Fakih, 2001:217-218). Chomsky (1999) mengidentifikasi bahwa pendirian neoliberalisme dicirikan sebagai berikut: kebijakan pasar bebas yang mendorong perusahaan-perusahaan swasta dan pilihan konsumen, penghargaan atas tanggungjawab personal dan inisiatif kewiraswastaan, serta menyingkirkan birokrasi dan “parasit” pemerintah yang tidak akan pernah mampu, meskipun dikembangkan. Aturan dasar kaum neo-liberal adalah, “liberalisasikan perdagangan dan finansial, biarkan pasar menentukan harga, akhiri inflasi, (stabilisasi ekonomi-makro dan privatisasi), dan kebijakan pemerintah haruslah “menyingkir dari penghalang jalan” (Fakih, 2001:218).

Proses liberalisasi pasar yang terjadi secara masif sejak tahun 1970-an pada dasarnya dikendalikan oleh doktrin neoliberalisme yang sejak dekade 1940-an telah didesakkan kemunculannya oleh pioner aliran ini, yakni Friedrich Von Hayek dan muridnya Milton Friedman dari Universitas Chicago. Inti ajaran neoliberalisme mencakup: keutamaan pembangunan ekonomi; pentingnya perdagangan bebas untuk merangsang pertumbuhan; pasar bebas tanpa restriksi; pilihan individual; pemangkasan regulasi pemerintah; dan pembelaan atas model pembangunan sosial evolusioner yang berakar dari pengalaman barat yang dapat diterapkan ke seluruh dunia (Steger, 2002:36-37). Ajaran neoliberalisme ini sebenarnya merupakan revitalisasi atas doktrin-doktrin para pemikir liberal klasik, seperti Adam Smith (1723-1790), David

Ricardo (1772-1823) dan Herbert Spencer (1820-1903). Para tokoh neoliberal yang kemudian terkenal dengan julukan intelektual “Kanan baru” (*new right*) menghidupkan kembali ajaran-ajaran lama, namun dalam bingkai dan kemasan baru. Meminjam istilah Steger- mereka melakukan “*pouring old philosophical wine into new ideological bottles*”, yakni menuang anggur filsafat lama dalam botol ideologis baru. Keberhasilan Hayek dan Friedman dalam mengembangkan gagasan-gagasannya telah menyulut gelombang pengingkaran massal terhadap paradigma Keynesian (Syeirazi, 2003: 17).

Popularitas neoliberalisme dalam praksis kebijakan publik melejit pada tahun 1979 di Inggris ketika pemerintahan dipimpin oleh Margareth Thatcher. Selaku representasi dari kaum liberal klasik, Perdana Menteri Margareth Thatcher percaya sepenuhnya pada mekanisme pasar, dan sebaliknya meragukan kemampuan negara untuk berperan mengoperasikan kehidupan ekonomi dan bisnis. Hal ini didasari pengalaman masa-masa sebelumnya di mana monopoli negara (terutama di sektor transportasi, komunikasi, dan sumber daya energi), pada gilirannya menimbulkan kesulitan finansial yang sangat serius bagi pemerintah Inggris. Perdana Menteri Margareth Thatcher kemudian meluncurkan program-program liberalisasi ekonomi dengan memerangi berbagai bentuk subsidi dan tunjangan yang selama ini diberikan negara kepada masyarakat, dan pada saat yang sama menswastanisasikan badan-badan usaha milik negara di Inggris secara besar-besaran. Secara khusus, pemerintah Inggris merumuskan

sasaran reformasi ekonomi dengan membatasi pengaruh dan kekuasaan serikat-serikat buruh sektor publik, mengurangi peran pemerintah, meningkatkan efisiensi sektor publik, dan membangkitkan persaingan usaha. Selama periode 1979-1993, Margareth Thatcher berhasil mengubah realitas BUMN di Inggris dari semula penerima subsidi menjadi penghasil pajak. Dampaknya, masyarakat pun menikmati penurunan tarif berkat adanya perbaikan pelayanan publik (Choirie, 2004:56-58).

Keberhasilan program reformasi ekonomi yang dijalankan pemerintahan Margareth Thatcher selain dijadikan model bagi privatisasi perusahaan negara di sejumlah negara, juga membangkitkan semangat untuk “menyingkirkan” peran negara dari kehidupan ekonomi dan bisnis (Choirie, 2004:58). Pada dasawarsa 1980-an, pengalaman Inggris itu mengilhami Amerika Serikat di bawah Presiden Ronald Reagan untuk melancarkan gerakan serupa. Revolusi di dua negara yang berpengaruh besar ini melahirkan julukan Reagan-Tatcherism yang kemudian didukung oleh Kanselir Jerman Helmut Kohl. Dengan dukungan dari ketiga negara yang berpengaruh besar ini, neoliberalisme menyebar ke seluruh dunia melalui berbagai lembaga internasional, terutama yang bobot pengaruh keanggotaannya ditentukan oleh besarnya sumbangan pendanaan, seperti IMF dan Bank Dunia (Mas’oed, 2002:6).

Dalam diplomasi pembangunan, gagasan dan kebijakan neoliberal itu dikemas dalam paket kebijakan ekonomi yang oleh John Williamson disebut sebagai *Washington Consensus* karena paket kebijakan ini didukung

oleh para pejabat Departemen Keuangan Amerika Serikat, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, IMF, dan Bank Dunia. Paket kebijakan ekonomi itu memiliki ciri-ciri: *Pertama*, intervensi pemerintah harus dihilangkan atau diminimumkan. Intervensi pemerintah selama ini dianggap merupakan sumber yang menimbulkan masalah-masalah pembangunan. Intervensi pemerintah telah bertanggungjawab dalam menimbulkan distorsi-distorsi dalam mekanisme penentuan harga yang telah mengakibatkan *misallocation of productive resources* dan selanjutnya berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. *Kedua*, swastanisasi yang seluas-luasnya dalam ekonomi. Dalam hal ini, penguasaan pemerintah dalam aset ekonomi dan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi termasuk kegiatan dalam pembangunan prasarana publik diminimumkan. *Ketiga*, liberalisasi seluruh kegiatan ekonomi. Segala jenis proteksi dalam berbagai bentuk dihilangkan. Mekanisme pasar bebas walaupun dapat menimbulkan ketidaksempurnaan dianggap jauh lebih baik dari ketidaksempurnaan akibat intervensi pemerintah. Dalam kaitan ini, demi meningkatkan daya saing dan efisiensi unit-unit ekonomi domestik, liberalisasi impor dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan GATT. *Keempat*, memperbesar dan memperlancar arus masuk modal asing dengan fasilitas-fasilitas yang lebih luas. Ketentuan-ketentuan yang membatasi pemilikan dihilangkan sehingga dominasi asing dianggap sebagai sesuatu yang wajar atas nama "globalisasi". Ciri ketiga dan keempat mengandung pengertian bahwa ekonomi domestik harus lebih

diintegrasikan ke dalam kancan ekonomi internasional (Arif, 1998:34-36).

Sejak saat itu gagasan neoliberal menyebar ke negara-negara sedang berkembang. Intensitas penyebarannya semakin gencar ketika lembaga-lembaga multilateral, seperti: IMF dan Bank Dunia, mengkampanyekan *Washington Consensus* dalam bentuk penerapan paket kebijakan bernama *Structural Adjustment Programs* (SAPs). Joseph Stiglitz (2001) menjuluki SAPs sebagai fundamentalisme pasar (*market fundamentalism*) yaitu paradigma ekonomi yang menggunakan pasar sebagai basis ideologinya. Sedangkan Frances Stewart (dalam Emmerij, 1997:62) menyatakan bahwa *Washington Consensus* dapat diasosiasikan sebagai program perekayasaan ekonomi politik yang mewakili kepentingan Barat. Paket kebijakan ekonomi neoliberal ini meliputi: (1) Penghapusan kontrol atas harga komoditi, faktor produksi, dan mata uang; (2) Jaminan pendisiplinan fiskal dan pengekangan defisit anggaran; (3) Pengurangan belanja-belanja publik, khususnya militer dan administrasi publik; (4) Reformasi pajak, untuk menciptakan sistem dengan basis luas dan pelaksanaan efektif; (5) Liberalisasi finansial, dengan tingkat suku bunga yang ditentukan pasar; (6) Nilai tukar bersaing, untuk menyokong pertumbuhan berbasis ekspor; (7) Liberalisasi perdagangan beserta penghapusan ijin impor dan penurunan tarif; (8) Mendorong peningkatan tabungan domestik; (9) Mendorong investasi asing; (10) Privatisasi badan-badan usaha milik negara; (11) Deregulasi ekonomi; (12)

Perlindungan terhadap hak-hak milik (Mas'ood, 2002:7-8).

IMF dan Neoliberalisme

IMF berdiri pada bulan Juli 1944 di kota kecil Bretton Woods, yang terletak di negara bagian New Hampshire, tak jauh dari Boston, Amerika Serikat. Saat itu Perang Dunia II sudah menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Karena itu, untuk mengantisipasi, Amerika Serikat, Inggris (yang rombongannya diketuai oleh salah satu ekonom terbesar sepanjang masa, John Maynard Keynes), serta 42 negara lainnya hadir dalam konferensi di Bretton Woods. Konferensi itu bertujuan untuk membentuk lembaga-lembaga ekonomi multilateral yang amat dibutuhkan negara-negara tersebut pada masa pasca perang (Wibowo dan Wahono, 2003:115).

Agenda pokok konferensi itu adalah untuk menciptakan suatu tata ekonomi internasional pasca Perang Dunia kedua yang stabil, fleksibel, dan bisa mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Hasilnya, pada bidang pembangunan ekonomi (*economic development*), disepakati pembentukan *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) yang bertugas membantu negara-negara yang sedang membangun. Karena banyak negara yang porak poranda disapu perang, mereka pun perlu melakukan rekonstruksi atau pembangunan kembali. Kongkretnya, mereka membutuhkan dana besar, alias memerlukan pinjaman. Di sinilah IBRD berperan memberi bantuan lunak (*soft loan*) dan kalau perlu bahkan hibah (*grant*). Lembaga multilateral ini kemudian dikenal sebagai Bank Dunia (*World Bank*), sekalipun namanya

tetap IBRD. Bank Dunia umumnya menyediakan paket utang untuk proyek-proyek dan program-program yang menyangkut pembangunan infrastruktur, pendidikan, pemberantasan kemiskinan, menjaga lingkungan, dan yang sejenis. Sementara di bidang moneter, 44 negara tersebut juga merasa perlu melakukan koordinasi untuk menghindari kekacauan dalam sistem nilai tukar. Karena itu, dibentuklah IMF (*International Monetary Fund*). Selain bertindak sebagai pengatur sistem keuangan (misalnya soal kurs), tugas utama IMF adalah membantu negara-negara anggotanya yang dilanda krisis neraca pembayaran. Kedua lembaga kembar tersebut kemudian disebut sebagai "sistem Bretton Woods" dan berkantor pusat di Washinton D.C. sebagai bagian dari organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (Wibowo dan Wahono, 2003:115).

Sumber kekuatan IMF, menurut Gold (1970) bukanlah terletak pada sumber-sumber keuangan yang dikuasainya, melainkan pada kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemerintah negara-negara industri Barat dan masyarakat bisnis internasional. Sudah merupakan praktek biasa bagi para kreditor asing, pemerintah maupun swasta, untuk mensyaratkan bahwa pinjaman mereka kepada negara-negara kurang maju akan diberikan kalau negara-negara peminjam itu membuat persetujuan dengan IMF tentang apa yang disebut *standby agreement* (Mas'ood, 1989:84). Apabila IMF memberikan sinyal positif pada suatu negara, maka sejumlah kreditor dan investor asing akan serta merta meminjamkan dan menanamkan modalnya ke negara tersebut. Sebaliknya bila IMF merespon negatif,

maka kreditor dan investor asing akan mengurungkan niatnya untuk meminjamkan dan menanamkan modalnya di negara tersebut.

IMF senantiasa beranggapan bahwa untuk semua negara hanya ada satu obat, yang terkenal dengan sebutan “*structural adjustment programs*” (SAPs). Di seluruh dunia, di manapun, IMF senantiasa menerapkan kebijakan SAP ini terhadap negara-negara yang mengalami masalah dalam hal keuangan. Negara-negara harus melakukan tiga hal: liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi. Ketiganya merupakan pilar utama dari konsep pemulihan ekonomi bagi negara-negara berkembang, yang kemudian disebut sebagai “*Washington Consensus*”. Dalam memberikan terapi kepada pasiennya (negara anggota yang sakit), IMF biasanya meminta agar dilakukan perubahan fundamental dalam hubungan antara negara dengan pasar. Persyaratan-persyaratan ini disebut IMF *conditionality*. Dalam kasus Indonesia, IMF *conditionality* tersebut tertuang dalam *Letter of Intent* (LoI), yakni program-program yang disepakati oleh kedua belah pihak (pemerintah Indonesia dengan IMF), untuk melakukan perubahan ekonomi secara fundamental tersebut.

Mengenai hal ini, Ikenberry (1990:90) menjelaskan bahwa ada dua macam transmisi dalam penerapan gagasan neoliberal itu di negara-negara berkembang, yakni melalui “kebijakan peniruan” (*policy bandwagoning*) dan melalui “pengondisian” (*conditionality*). Menurutnya, peniruan pembuatan kebijakan publik di negara-negara sedang berkembang terhadap apa yang diterapkan negara-negara maju memang wajar. Bahkan untuk

sementara dapat dianggap sebagai sesuatu yang alamiah tanpa rekayasa apa pun. Dalam konteks ini, biasanya para pembuat kebijakan di negara sedang berkembang berkeinginan untuk meniru solusi yang diambil oleh negara maju dalam menghadapi masalah yang sama. Namun tak dapat dipungkiri bahwa ada sebagian negara sedang berkembang lain melakukan peniruan karena bertujuan mendekati diri kepada lembaga donor internasional guna mendapatkan permodalan. Kejadian terakhir ini biasanya disebut “pengondisian” (*conditionality*) yang dilakukan oleh lembaga donor seperti World Bank dan IMF kepada negara-negara sedang berkembang (dalam Jusuf, 2005:53). Menurut Gunalatika dan Marr (1998:61), dua orang ekonom konsultan Bank Dunia, indikasi sebuah negara melakukan kebijakan peniruan adalah jika penerapan SAPs oleh negara yang bersangkutan tidak disertai dengan permintaan bantuan *structural adjustment loans* (SALs). Sebaliknya jika sebelum menerapkan SAPs negara itu meminta SALs, berarti negara berada dalam kondisi keterpaksaan (dalam Jusuf, 2005:53).

Karena itu, secara ideologis IMF menganut paham liberalisme-kapitalisme. Ini bisa dilihat dari proses pemaksaan IMF terhadap negara-negara yang mendapatkan bantuan hutang untuk lebih membuka pasar dalam negeri mereka, menekankan pada kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang-barang ekspor, mengurangi subsidi pemerintah terhadap sektor publik, dan proses privatisasi perusahaan-perusahaan negara. Singkatnya IMF dipakai sebagai alat oleh negara-negara utara untuk memaksakan model pembangunan yang menguntungkan negara-negara

maju. Melalui *Structural Adjustment Programs*, negara-negara dunia ketiga dipaksa untuk menerima resep ekonomi yang didiktekan negara-negara maju (Peng, 1993:xxiii). Konsekuensinya, negara yang telah menandatangani harus melaksanakan tiap poin atau *item* yang tertuang di dalamnya. Jika negara-negara yang terkena krisis itu memiliki komitmen kuat untuk melakukan reformasi dan restrukturisasi ekonomi, maka IMF akan mengalirkan dana secara cepat. Sebaliknya, jika negara-negara yang terkena krisis itu tersebut tak konsisten dalam melaksanakan reformasi dan restrukturisasi ekonomi, maka IMF pun ragu-ragu dalam membantu mencairkan dana.

Proses pengambilan keputusan dalam sidang-sidang IMF tidak berdasarkan “*one man one vote*”, tetapi lebih berdasarkan pada peraturan menurut besarnya dana yang disetorkan setiap negara anggota yang jumlahnya sampai 250 negara, ditambah 1 suara untuk setiap 100.000 Special Drawing Right (SDR). Dengan demikian, maka hanya negara-negara kaya saja yang memiliki suara terbesar, yakni: Amerika Serikat (19,1 persen), Inggris (6,6 persen), Jerman (5,7 persen), Perancis (4,8 persen), Jepang (4,5 persen), dan Kanada (3,1 persen). Bersama negara-negara maju lainnya mereka menguasai 57,6 persen hak suara. Sedangkan gabungan seluruh hak suara negara-negara berkembang hanya 34,4 persen (Mas’oed, 1990). Dalam beberapa kasus, proses pengambilan keputusan di IMF dilakukan berdasarkan jumlah kepemilikan saham, yaitu dengan ketentuan 85 persen suara setuju. Sesuai dengan jumlah kepemilikan sahamnya, tujuh negara industri maju

yang tergabung dalam G-7 (Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Jerman, Perancis, Kanada, dan Italia) mempunyai hak suara hampir 45 persen. Karena sebagai pemegang saham utama Amerika Serikat ternyata menguasai 19,1 persen suara, maka praktis tidak ada keputusan yang dapat diambil IMF tanpa persetujuan Amerika Serikat (Baswir, 2003:40).

Dengan sangat dominannya peranan negara-negara G-7, khususnya Amerika Serikat, dalam proses pengambilan keputusan di IMF, lembaga tersebut menjadi sulit menghindar untuk tidak bekerja bagi kepentingan negara-negara kaya itu. Sesuai dengan sifat demokrasi liberal yang terkooptasi oleh kepentingan para pemodal besar, dominasi negara-negara G-7 dalam tubuh IMF praktis sama artinya dengan dominasi kepentingan perusahaan-perusahaan transnasional (Baswir, 2003:40-41). Sebab itu, tidak aneh jika agenda-agenda IMF cenderung terpusat pada empat hal. *Pertama*, pengetatan anggaran negara, yaitu untuk menjamin kelancaran pembayaran utang. *Kedua*, liberalisasi sektor keuangan, yaitu untuk memberi keleluasaan kepada para pemodal internasional untuk datang dan pergi sesuka hati mereka. *Ketiga*, liberalisasi sektor perdagangan, yaitu untuk mempermudah penetrasi produk negara-negara industri maju. Dan *keempat*, privatisasi BUMN, yaitu untuk memperlemah intervensi negara dan memperkuat dominasi perusahaan transnasional di negara-negara yang bersangkutan (Baswir, 2003:41-42).

Peran IMF dalam tata moneter internasional khususnya di negara-negara berkembang mulai menonjol sejak pertengahan 1960-an setelah sempat tak aktif pada masa

perang antara tahun 1940-an sampai 1950-an. Namun peran menonjol ini sempat goyah ketika Amerika Serikat secara sepihak mengambang nilai tukar tetap mata uang dolarnya terhadap emas pada tahun 1971. Beberapa mata uang dunia pun ikut mengambang dan melahirkan apa yang kemudian dikenal sebagai “krisis moneter internasional” yang melemahkan IMF sebagai pelaksana utama tugas manajemen nilai tukar uang dunia (Subagyo, 2002:30). IMF pelan-pelan memulihkan peranannya ketika krisis lainnya meledak, yakni “krisis minyak dunia” pada tahun 1973-1974 yang memaksa banyak negara, terutama negara-negara dunia ketiga, meminta bantuan IMF. Karena persoalannya memang sudah berkait berkelindan sedemikian rupa, maka IMF pun tak cuma mengurus persoalan mata uang, tetapi juga kebijakan ekonomi makro negara-negara yang menerima dana pinjamannya. Akhirnya peran baru ini dikukuhkan dalam amandemen ke-2 terhadap Pasal 1 dari Pasal-Pasal mengenai persetujuan pendirian IMF pada tahun 1948 (Subagyo, 2002:30).

Pengaruh IMF semakin besar dan kuat ketika terjadi krisis berikutnya yaitu “krisis hutang dunia” yang bermula pada tahun 1982 terutama karena IMF memang terlibat langsung dalam upaya pemulihan krisis yang terjadi di negara-negara Amerika latin seperti: Brazil, Argentina, Meksiko, dan Chile. Saat itu, negara-negara Amerika Latin sedang terperangkap hutang sehingga tak bisa membayar cicilan pokok maupun bunganya. Krisis hutang ini pun membawa kawasan tersebut pada kondisi kemiskinan, keterbelakangan, dan pengangguran yang mengarah pada kerusuhan sosial politik

(Subagyo, 2002:30). Dalam kondisi demikian, peran IMF diperlukan oleh negara-negara tersebut untuk mengalirkan dana bagi upaya pemulihan krisis.

Masa kejayaan IMF benar-benar terjadi ketika negara-negara Asia yang sebelumnya mengalami “booming” dan “economic miracle” dilanda krisis moneter dan ekonomi pada pertengahan 1997. Krisis yang bermula dari Thailand ini merembet ke Korea Selatan, Indonesia, dan Philippina. Krisis moneter dan ekonomi ini menghancurkan sendi-sendi fundamental perekonomian nasional sebagian besar negara-negara Asia Timur dan Tenggara. Guna memulihkan keadaan, negara-negara yang paling parah terkena krisis seperti Thailand, Indonesia, dan Korea Selatan, meminta bantuan dana ke IMF. Krisis ekonomi Asia di kuartal akhir tahun 1990-an ini semakin mengukuhkan ketergantungan negara-negara Asia terhadap IMF (Subagyo, 2002:31). Setelah gelombang krisis moneter menyapu keajaiban Asia sejak 1997, posisi IMF kian mutlak. Apalagi setelah pertengahan 1998, Rusia terseret krisis finansial global dan terpaksa mendevaluasi mata uang rubel dan meminta bantuan IMF. Eskalasi krisis ke kawasan Amerika Latin pada awal 1999, juga menjadi celah bagi IMF untuk menancapkan kukunya lebih dalam (Ismawan, 2002:25).

Kesimpulan

Ada dua macam transmisi dalam penerapan gagasan neoliberal itu di negara-negara berkembang, yakni melalui “kebijakan peniruan” (*policy bandwagoning*) dan melalui “pengondisian” (*conditionality*). Peniruan pembuatan kebijakan publik

di negara-negara sedang berkembang terhadap apa yang diterapkan negara-negara maju memang wajar. Bahkan untuk sementara dapat dianggap sebagai sesuatu yang alamiah tanpa rekayasa apa pun. Dalam konteks ini, biasanya para pembuat kebijakan di negara sedang berkembang berkeinginan untuk meniru solusi yang diambil oleh negara maju dalam menghadapi masalah yang sama. Namun tak dapat dipungkiri bahwa ada sebagian negara sedang berkembang lain melakukan peniruan karena bertujuan mendekatkan diri kepada lembaga donor internasional guna mendapatkan permodalan. Kejadian terakhir ini biasanya disebut “pengondisian” (*conditionality*) yang dilakukan oleh lembaga donor seperti World Bank dan IMF kepada negara-negara sedang berkembang.

Krisis ekonomi menciptakan peluang bagi munculnya perubahan kebijakan secara radikal di negara-negara berkembang. Kenyataannya, krisis memperkuat posisi lembaga multilateral seperti IMF untuk mendesakkan perubahan kebijakan sesuai dengan resep yang ditempuh negara-negara maju. Dari sisi ekonomi, krisis tersebut telah menggerogoti kemampuan keuangan pemerintah negara-negara berkembang dalam memenuhi kebutuhan material rakyat. Sedangkan dari sisi politik, dahsyatnya krisis telah mengakibatkan turunnya dukungan rakyat terhadap kelangsungan kekuasaan pemerintah. Dalam upaya melindungi eksistensinya, pemerintah negara-negara berkembang meminta dukungan dari lembaga keuangan internasional khususnya IMF. Langkah ini diharapkan mampu mendatangkan suntikan modal untuk mempercepat proses pemulihan setelah didera krisis.

Namun konsekuensinya, lemahnya posisi tawar membuat pemerintah negara-negara berkembang tak dapat mengelak dari intervensi politik IMF yang begitu dominan dalam mendesakkan perubahan kebijakan ekonomi secara radikal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Sritua, 1998, *Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia*, Bandung: Zaman Wacana Mulia.
- Baswir, Revrison, 2003, *Di Bawah Ancaman IMF*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Choirie, A. Effendy, 2004, *Privatisasi Versus Neo-Sosialisme Indonesia*, Jakarta: LP3ES
- Emmerij, Louis (eds), 1997, *Economic and Social Development into the XXI Century*, Washinton: John Hopkins University Press
- Fakih, Mansour, 2001, *Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Insist Press.
- Gold, Joseph, 1970, *The stand-By Arrangements of the International Monetary Fund*, Washinton D.C: IMF.
- Gold, Joseph, 1980, *The Rule of Law in the International Monetary Fund*, Washinton: International Monetary Fund.
- Ismawan, Indra, 2002, *Di Bawah Cengkraman IMF, Peran IMF dalam Krisis Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Edukasi.
- Jusuf, Muhammad Machmuddin, 2005, *Privatisasi Layanan Publik: Studi tentang Dimensi Politik Kebijakan Pembangunan Jalan Tol Cawang-Tanjung Priok*, Desertasi S-3 Ilmu sosial dan Politik, Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

- Mas'oeed, Mohtar, 1989, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru*, Jakarta: LP3ES.
- Mas'oeed, Mohtar, 1990, *Ekonomi Politik Internasional*, Diklat Kuliah, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.
- Mas'oeed, Mohtar, 2002, *Tantangan Internasional dan Keterbatasan Nasional: Analisis Ekonomi-Politik Tentang Globalisasi Neoliberal*, Pidato pengukuhan jabatan Guru Besar Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta: tidak diterbitkan.
- Matthew B. Milles, dan A. M. Huberman, 1992, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*, Beverly Hills: Sage Publications.
- Peng, Martin Khor Kok, 1993, *Hubungan Utara Selatan: Konflik atau Kerjasama*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Steger, Manfred B., 2002, *Globalism: The New Market Ideology*. Boston: Rowman & Littlefield.
- Steward, Frances, "John Williamson and the Washinton Consensus Revisited", dalam: Louis Emmerij (eds), 1997, *Economic and Social Development into the XXI Century*, Washinton: John Hopkins University Press.
- Stiglist, Joseph E., 2001, *Globalization and Its Discontents*, New York: WW. Nortoa & Company.
- Subagyo, Agus, 2002, *Penerapan Letter of Intent (LoI) IMF untuk Mengatasi Krisis Ekonomi di Indonesia dan Korea Selatan*, Tesis S-2, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Syeirazi, M. Kholid, 2003, "Dilema Praktis Globalisasi Neoliberal", dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 7, Nomor 1, Juli, h 17
- Wibowo, I. dan Francis Wahono (ed.), 2003, *Neoliberalisme*, Yogyakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas